



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 4956-4965

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengalaman Hidup Gelandangan dan Pengemis Memaknai Kebijakan Larangan menjadi Gelandangan dan Pengemis

Mardhika^{1✉}, Lukmanul Hakim², Sopyan Resmana Adiarsa³

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: mardhika800@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Fenomena adanya gelandangan dan pengemis masih menjadi isu penting yang dihadapi pemerintah daerah. Di Kabupaten Karawang meskipun aturan larangan menjadi gelandangan dan pengemis sudah diberlakukan namun realitas sehari-hari menunjukkan tetap saja masih banyak ditemui fenomena adanya gelandangan dan pengemis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengalaman hidup gelandangan dan pengemis dalam memaknai kebijakan larangan menjadi gelandangan dan pengemis yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain metode penelitian analisis fenomenologi interpretatif dengan jumlah partisipan sebanyak 4 orang yang merupakan 2 orang pengemis dan 2 orang gelandangan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi partisipan penelitian yang merupakan gelandangan dan pengemis, menjadi gelandangan dan pengemis adalah sebagai keterpaksaan untuk bertahan hidup karena keterbatasan ekonomi. Kebijakan larangan menjadi gelandangan dan pengemis dimaknai oleh partisipan penelitian sebagai kebijakan yang tidak solutif bagi mereka sehingga meskipun kebijakan tersebut telah ditetapkan dan diberlakukan namun tidak diikuti kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Bagi gelandangan dan pengemis, labeling masyarakat terhadap mereka yang cenderung kurang baik telah menyebabkan masyarakat tidak percaya kepada mereka dan berdampak kepada semakin membatasi akses mereka terhadap lapangan pekerjaan. Menjadi gelandangan dan pengemis terpaksa tetap dilakukan karena di satu sisi tidak ada pekerjaan lain dan di sisi lain pemerintah tidak memberikan solusi yang jelas untuk mereka.

Kata Kunci: *Pengalaman Hidup, Gelandangan, Pengemis, Kebijakan, Analisis Fenomenologi Interpretatif*

Abstract

The phenomenon of homelessness and beggars is still an important issue faced by local governments. In Karawang Regency, although regulations prohibiting being homeless and beggars have been implemented, daily reality shows that there are still many phenomena of homeless people and beggars. This research aims to explore the life experiences of homeless people and beggars in interpreting the policy prohibiting being homeless and beggars issued by the Karawang Regency government. This research uses a qualitative research method with an interpretative phenomenological analysis research method design with a total of 4 participants, 2 beggars and 2 homeless people. The research results show that for research participants who are homeless and beggars, being homeless and beggars is a compulsion to survive due to economic limitations. The policy of prohibiting being homeless and beggars was interpreted by research participants as a policy that was not a solution for them so that even though the policy had been established and enforced, compliance with the policy was not followed. For homeless people and beggars, society's labeling of those who tend to be less good has caused society to distrust them and has had the impact of further limiting their access to employment opportunities. Being homeless and beggars is forced to continue because on the one hand there is no other work and on the other hand the government does not provide a clear solution for them.

Keywords: Life Experience, Homelessness, Beggars, Policy, Interpretative Phenomenological Analysis

PENDAHULUAN

Tingkat kemiskinan dan kesejahteraan di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab adanya gelandangan dan pengemis. Indonesia sendiri termasuk negara berkembang yang memiliki tingkat kemiskinan mencapai 9,36 persen dan memiliki 25,90 juta orang masyarakat miskin (Data BPS 202x`3). Faktor keterbatasan ekonomi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong individu menjadi gelandangan dan pengemis sehingga gelandangan dan pengemis juga seringkali dimaknai sebagai profesi atau pekerjaan tetap untuk mendapatkan penghasilan. Bahkan di Indonesia, tidak sedikit dari gelandangan dan pengemis yang juga ternyata hidup dengan jumlah penghasilan yang fantastis. Hal itu dibuktikan dengan adanya para pengemis yang dirazia oleh Satuan Polisi Pamong Praja di berbagai daerah di Indonesia dan ditemukan para pengemis yang terkena razia tersebut diantaranya memiliki harta miliaran rupiah. (Arfiansyah & Nugroho, 2022). Keterbatasan ekonomi di satu sisi dan keuntungan yang cukup menggiurkan di sisi lain menjadi dua hal yang mengitari motivasi individu menjadi gelandangan dan pengemis selain faktor lainnya seperti faktor sosial, psikologi, pendidikan bahkan agama (Hajon, Arvianti, & Sasmito, 2023).

Maraknya gelandangan dan pengemis di setiap sudut daerah, mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penanganan permasalahan ini. Strategi penanganan gelandangan dan pengemis di Indonesia termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980

Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Adapun upaya yang dilakukan meliputi upaya preventif dengan melakukan penyuluhan sosial, pemberian bantuan sosial, dan pembinaan sosial; upaya represif melalui pelaksanaan razia, penampungan sementara untuk diseleksi dan pelimpahan; serta upaya rehabilitatif seperti memasukkan gelandangan dan pengemis yang terjaring razia ke dalam panti sosial untuk pembinaan lebih lanjut (Harun, 2018; Indriyani, Sungkono, & Karnama, 2022; Salsabila, Purba, & Saragih, 2022).

Upaya-upaya sejenis juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang yang juga menghadapi persoalan gelandangan dan pengemis. Fenomena keberadaan gelandangan dan pengemis juga ditemui di Kabupaten Karawang. Hal itu bisa dilihat secara nyata di lapangan dimana banyak ditemui gelandangan dan pengemis di tempat-tempat umum dan berdasarkan data yang di publikasikan melalui website open data Karawang tercatat sebanyak 411 orang merupakan gelandangan dan pengemis. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Jumlah Gelandangan dan Pengemis Kabupaten Karawang Tahun 2021

No	Kategori	Jumlah
1	Gelandangan	245
2	Pengemis	166
Total		411

Sumber: Open Data Karawang, 2021

Data diatas menunjukkan masih banyak jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Karawang. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk ikut serta dalam mengentaskan permasalahan ini. Upaya menangani permasalahan ini tidak cukup dengan melakukan rehabilitasi, memberikan pelatihan atau memberikan bantuan pemberdayaan tetapi juga diperlukan upaya penyadaran. Upaya penanganan tidak cukup dengan merehabilitasi mereka yang termasuk dalam kategori gelandangan dan pengemis tetapi juga harus dilakukan pencegahan agar fenomena ini tidak terjadi secara terus menerus. Upaya ke arah tersebut sudah dilakukan misalnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pada pasal 50 dalam aturan tersebut, diatur larangan bagi setiap orang dilarang menjadi menjadi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan dan topeng monyet jalanan. Namun demikian, meskipun secara hukum dan kebijakan sudah dibuat dan ditetapkan, sejauh ini masih terdapat kesenjangan antara realitas atau praktik di lapangan dengan ketetapan dan tujuan dari kebijakan tersebut. Fakta dilapangan menunjukkan masih

banyak ditemukan gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di Kabupaten Karawang. Berpijak dari fenomena ini, maka peneliti berupaya mengkaji permasalahan ini secara mendalam melalui perspektif interpretatif terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti melihat permasalahan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui perspektif atau pendekatan interpretatif. Pendekatan interpretatif ini digunakan untuk mengetahui subjektivitas individu dalam memaknai fenomena gelandangan dan pengemis melalui pengalaman individu. Pada dasarnya implementasi kebijakan tidak terlepas dari interpretasi para aktor yang terlibat (Dunn, 1999; Edward III, 1980; Grindle, 1980). Analisis implementasi kebijakan interpretatif menggeser fokus pembahasan dari nilai sebagai sekumpulan resiko, manfaat dan pilihan kepada nilai-nilai, keyakinan dan perasaan sebagai kumpulan makna dari perspektif perilaku manusia sebagai idealnya yaitu sebagai instrumen rasional dan teknis ke tindakan manusia sebagai pengungkapan (makna) (Yanow, 2020) dalam (Pulzl & Treib, 2014)

Meskipun banyak penelitian tentang upaya penanganan gelandangan dan pengemis di berbagai daerah di Indonesia, sebagian besar menggunakan perspektif kelembagaan (institusionalisme) yang melihat implementasi kebijakan secara top-down (Afjan & Hayat, 2023; Bedasari & Wahyuni, 2020; Hajon et al., 2023; Indriyani et al., 2022; Ratri & Priyanti, 2021; Salsabila et al., 2022). Masih belum banyak penelitian implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis yang menggunakan perspektif interpretatif yang berfokus pada analisis "bagaimana arti kebijakan" dan hal ini juga yang membedakannya dengan analisis tradisional yang berkonsentrasi pada menjelaskan kesenjangan implementasi antara tujuan kebijakan dan hasil kebijakan (Yanow, 1996) dalam (Pulzl & Treib, 2014).

Peneliti menggunakan pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang pemaknaan dari pengalaman hidup individu yang terlibat dalam fenomena implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial khususnya tentang pasal 50 tentang larangan menjadi pengemis dan gelandangan. Melalui pendekatan interpretatif ini peneliti berfokus untuk menafsirkan makna yang diberikan oleh aktor kebijakan yang terlibat yang seringkali juga dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya terhadap pengalaman hidupnya. Peneliti akan menggali makna yang terkandung dalam pengalaman individu, serta memahami konstruksi sosial tentang gelandangan dan pengemis. Penggunaan pendekatan interpretatif ini diharapkan akan mampu membantu peneliti untuk dapat menggambarkan beragam makna dan perspektif dari setiap aktor yang terlibat dalam

permasalahan ini seperti gelandangan dan pengemis, dan pemerintah sehingga diharapkan kebijakan pencegahan dan penanganan gelandangan dan pengemis dapat lebih inklusif yaitu melibatkan pemahaman dari berbagai aktor terutama gelandangan dan pengemis dari perspektif masing-masing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain metode penelitian menggunakan analisis fenomenologi interpretatif. "Pendekatan fenomenologi berupaya untuk menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala, termasuk di dalamnya konsep diri atau pandangan hidup mereka sendiri" (Creswell, 2013) dalam (Kuswarno, 2007). Pada penelitian ini partisipan sebanyak 4 orang yang merupakan 2 orang pengemis dan 2 orang gelandangan. Analisis Fenomenologi Interpretatif atau IPA (Interpretative Phenomenology Analysis) memfokuskan diri pada penyelidikan pengalaman hidup pribadi secara mendetail dari suatu fenomena pada individu (Smith, 2011) dikutip (Kirn, Huff, Godwin, Ross, & Cass, 2019). IPA ini didasarkan pada tradisi fenomenologi, hermeneutika dan penyelidikan idiografis yang berupaya mengeksplorasi pengalaman hidup subyektif individu melalui penyelidikan pengalaman pertama individu (yakni pengalaman hidup yang nyata) atau pengalaman tingkat kedua (yakni reaksi sosio-emosional terhadap pengalaman hidup (Merleau-Ponty, 2022) dikutip (Kirn et al., 2019). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur.

Analisis data mengikuti metode IPA yang dilakukan oleh (İnönü, Çelebi, Gülhan, & Aras, 2024) yang mana merujuk ke Smith dan Osborne (2007) dan Pietkiewicz dan Smith (2014) yang melibatkan proses multistep sebagai berikut : pertama, semua wawancara direkam melalui alat perekam audio dan kemudian ditranskrip secara verbatim. Langkah ini meliputi proses mendengarkan rekaman dan pembacaan berulang, selama proses pertama ini peneliti mencermati kalimat yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Langkah selanjutnya yaitu peneliti membuat catatan deskripsi dari pernyataan-pernyataan hasil wawancara. Melalui hal ini peneliti dapat memahami secara holistik terhadap konten hasil wawancara penelitian. Dari proses pertama ini peneliti kemudian mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari hasil wawancara dan membandingkannya antara hasil dari partisipan dengan partisipan lainnya sehingga menghasilkan tema-tema yang merupakan gabungan dari tema-tema yang teridentifikasi. Sementara tema-tema lainnya yang tidak termasuk dihilangkan karena tidak relevan. Pada tahap ini, fokus peneliti adalah pada tema-

tema yang muncul dari hasil wawancara dengan partisipan daripada berfokus pada kerangka teoritis yang sudah ada sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi dan menafsirkan mengenai bagaimana partisipan sebagai seorang gelandangan dan pengemis dalam memaknai kebijakan larangan menjadi gelandangan dan pengemis. Proses analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan IPA dan menghasilkan tema gelandangan dan pengemis sebagai suatu keterpaksaan dan dalam tema tersebut mengandung beberapa sub tema lainnya yang berkaitan. Berikut rangkuman hasil yang diperoleh dari penemuan tema individual pada partisipan.

Tabel 2. Tema dan Sub Tema

Tema	Sub Tema
Gelandangan dan Pengemis Sebagai Keterpaksaan	1. Labeling Gelandangan dan Pengemis
	2. Kebutuhan Hidup

Gelandangan dan Pengemis Sebagai Keterpaksaan

Labeling Gelandangan dan Pengemis

Labeling merupakan suatu keadaan yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Seseorang yang dianggap menyimpang kemudian di cap atau diberi label oleh lingkungan sosialnya (J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2011:114). Perilaku gelandangan dan pengemis seringkali dianggap sebagai perilaku yang menyimpang bagi masyarakat umum.

Pengemis 1 yang diwawancarai oleh peneliti sebagai partisipan dalam penelitian ini menyatakan bahwa dirinya merasakan adanya cap negatif dari masyarakat seperti kotor, jorok, dan mengganggu.

"lebih ke takut sih karena masyarakat merasa kaya pengemis itu kotor jorok tapi untuk hidup kenapa harus malu" (P1)

Hal yang sama juga disampaikan oleh pengemis 2 bahwa dirinya merasa malu dihadapan masyarakat lain karena berperilaku meminta-minta.

"yang pasti ya ngerasa malu dan nggak enak karena ya minta-minta gitu deh cuman ini terpaksa supaya ibu bisa bertahan hidup makanya ibu juga sambil mulung" (P2)

Adanya cap negatif atau labeling masyarakat terhadap pengemis juga turut dilaksanakan oleh gelandangan, gelandangan 1 menyatakan dirinya malu dan sedih akibat ada perilaku yang mengucilkan dirinya dan keluarganya oleh masyarakat. Gelandangan 2

pun menyatakan hal yang sama seperti pengemis 1, pengemis 2, dan gelandangan 1 yaitu merasa malu dihadapan masyarakat karena berperilaku demikian.

Labeling buruk kepada gelandangan dan pengemis berdampak pada kehidupan gelandangan dan pengemis karena berakibat pada minimnya kesempatan kerja. Latar belakang mereka sebagai gelandangan dan pengemis membuat mereka sulit dipercaya untuk melakukan pekerjaan pada umumnya. Hal itu disampaikan oleh pengemis 1 yang tidak diterima dipekerjaan lain akibat dirinya menjadi sebagai gelandangan dan pengemis. Artinya gelandangan dan pengemis melakukan kegiatan tersebut akibat adanya keterpaksaan karena adanya label atau cap buruk dari masyarakat kepada gelandangan dan pengemis sehingga gelandangan dan pengemis tidak memiliki pilihan lain dalam mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-harinya.

Kebutuhan Hidup

Setiap manusia berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mempertahankan kehidupan secara berkelanjutan. Peran menjadi gelandangan dan pengemis mereka lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup untuk mendapatkan uang. Perilaku menjadi gelandangan dan pengemis dijadikan sebagai pekerjaan karena adanya labeling buruk dari masyarakat sehingga tidak mampu mendapatkan kesempatan pekerjaan seperti pada umumnya dan kondisi fisik yang sudah tidak memungkinkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada partisipan pengemis 1 menyatakan bahwa dirinya menjadikan mengemis sebagai pekerjaan karena kondisi fisiknya yang tidak bisa berjalan normal sehingga tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain

"iya ngemis aja soalnya ga bisa jalan mau kerja apa dek, ini aja setiap hari ibu di dorong anak ibu untuk keliling pakai kursi roda" (P1)

Adapun pengemis 2 menyatakan bahwa dirinya yang sudah lanjut usia dan berpendidikan rendah secara terpaksa menjadikan mengemis sebagai pekerjaan.

"ga ada yang bisa dikerjakan lagi dek, kita sih dulu ga selesai sekolahnya. Udah berumur gini baru kerasa salahnya ga sekolah, gada pilihan lain" (P2)

Gelandangan 1 mengatakan hal yang sedemikian bahwa gelandangan dijadikan pekerjaan untuk bertahan hidup serta gelandangan 2 menjelaskan bahwa dirinya menjadi gelandangan karena tidak adanya solusi lain.

"Malu dan sedih karena sering dikucilkan tapi saya tidak peduli karena mereka juga engga memberi makan saya" (G1)

Berdasarkan hal itu maka gelandangan dan pengemis dijadikan suatu pekerjaan akibat beberapa hal seperti kondisi fisik dan tidak adanya solusi yang jelas, hal itu mereka lakukan

semata-mata dalam rangka untuk bertahan hidup secara berkelanjutan meskipun mereka tahu secara jelas dan sadar bahwa perilaku gelandangan dan pengemis merupakan suatu yang dilarang oleh pemerintah terutama pemerintah daerah kabupaten karawang dalam peraturan daerah nomor 08 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya pasal 50 ayat 1 poin a yang melarang setiap orang menjadi gelandangan dan pengemis.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kepada beberapa partisipan dalam penelitian ini, ditemukan kesimpulan bahwa gelandangan dan pengemis secara jelas dan sadar mengetahui bahwa kegiatan atau perilakunya dilarang dalam aturan kebijakan peraturan daerah kabupaten karawang nomor 08 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya pasal 50 ayat 1 poin a. Adapun mereka tetap melakukan kegiatan tersebut sebagai suatu bentuk keterpaksaan untuk bertahan hidup meskipun berdasarkan pengalaman hidup dari gelandangan dan pengemis terdapat labeling buruk dari masyarakat yang kurang baik dirasakan.

Adanya labeling buruk dari masyarakat tidak membuat mereka berhenti untuk berperilaku sebagai gelandangan dan pengemis sebab tidak adanya solusi yang jelas dari pemerintah dan kebutuhan akan makan dan minum untuk bertahan hidup, selain itu kondisi fisik yang tidak ideal membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan pada umumnya sehingga secara terpaksa melanggar aturan yang melarang mereka menjadi gelandangan dan pengemis. Dengan demikian, temuan penelitian ini semakin menegaskan bahwa keberadaan gelandangan dan pengemis merupakan implikasi dari kondisi keterbatasan ekonomi dan fisik, konstruksi sosial dan politik (kebijakan pemerintah yang kurang solutif). Oleh karena itu, implikasi dari penelitian ini menyarankan dilakukannya penelitian implementasi kebijakan larangan menjadi gelandangan dan pengemis melalui pendekatan interpretatif dengan obyek penelitian menyorot pada pelaksana kebijakan dari pihak pemerintah supaya diketahui bagaimana arti kebijakan ini bagi mereka sehingga melengkapi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afjan, W. Y. P., & Hayat. (2023). Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang). *Journal Publicuho*, 6(2), 549–559. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.156>
- Arfiansyah, T. R., & Nugroho, R. S. (2022, February 5). *5 Pengemis Kaya di Indonesia, Hartanya Ada yang Mencapai Miliaran*. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/05/164500065/5-pengemis-kaya-di-indonesia-hartanya-ada-yang-mencapai-miliaran?page=all>. Kompascom+
- Bedasari, H., & Wahyuni, E. T. (2020). Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 230–241. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(2\).5973](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(2).5973)
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. In *SAGE Publication diterjemahkan oleh Pustaka Pelajar* (3rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2nd ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, G. G. (1980). *Implementing Public Policy* (1st ed.; R. L. Peabody, ed.). Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World* (1st ed.). Princeton: Princeton University Press.
- Hajon, Y. K., Arvianti, E. Y., & Sasmito, C. (2023). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja Kota Malang. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 3(3), 408–415. Retrieved from <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/552>
- Harun, T. (2018). UPAYA PENAGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KECAMATAN MARTAPURA KOTA KABUPATEN BANJAR (Perda Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis). *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 14–21. <https://doi.org/10.31602/as.v3i2.2086>
- Indriyani, I., Sungkono, S., & Karnama, M. M. (2022). Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Karawang. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 10162–10171. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3368>

- İnönü, G. N., Çelebi, S., Gülhan, M., & Aras, S. (2024). Observation as a professional tool for early childhood teachers' inquiry habit of mind: an interpretative phenomenological study. *European Early Childhood Education Research Journal*, (May). <https://doi.org/10.1080/1350293X.2024.2349639>
- Kirn, A., Huff, J. L., Godwin, A., Ross, M., & Cass, C. (2019). Exploring tensions of using interpretative phenomenological analysis in a domain with conflicting cultural practices. *Qualitative Research in Psychology*, 16(2), 305–324. <https://doi.org/10.1080/14780887.2018.1563270>
- Kuswarno, E. (2007). Tradisi Fenomenologi pada Penelitian Komunikasi Kualitatif Sebuah Pedoman Penelitian dari Pengalaman Penelitian. *Sosiohumaniora*, 9(2), 161–176. <https://doi.org/10.29313/mediator.v7i1.1218>
- Pulzl, H., & Treib, O. (2014). Implementasi Kebijakan Publik. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney (Eds.), *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode (Terjemahan)* (1st ed., Vol. 1, pp. 127–152). Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Ratri, Q. W., & Priyanti, E. (2021). Koordinasi Pemerintahan Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan. *The Indonesian Journal of Politics and Policy*, 3(2), 34–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/ijpp.v3i2.5782>
- Salsabila, Q., Purba, G., & Saragih, S. E. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 3(3), 132–141. <https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.85>
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
- Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial